

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Paripurnakan Penyampaian KUA-PPAS Tahun 2024



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378804/dprd-hss-paripurnakan-penyampaian-kua-ppas-tahun-2024>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun Anggaran 2024. KUA merupakan implementasi RKPD menggunakan sumber dana APBD HSS, dokumen tersebut menjadi acuan menyusun PPAS dan rancangan APBD 2024 mendatang. Sedangkan PPAS APBD adalah rancangan Program Prioritas serta Alokasi Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang menjadi acuan SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD.

Sesuai RKPD tahun anggaran 2024, tema pembangunan Kabupaten HSS “Akselerasi Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Pembangunan di Perdesaan, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”, yang didukung dengan prioritas pendukung strategi pembangunan. Untuk mencapai target pembangunan kita pada tahun anggaran 2024 diperlukan sumber penerimaan daerah untuk membiayainya, dalam mengukur kemampuan keuangan daerah meracik strategi serta menyusun prioritas program dan kegiatan.

Pada prinsipnya agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan, dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu upaya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program serta kegiatan dengan pemerintah turut

menjadi perhatian dalam menyusun prioritas belanja daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBD provinsi dan APBN, sehingga terjalin keterpaduan program pemerintah pusat dan daerah,

Dengan demikian setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS dalam APBD diharapkan benar-benar bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS H. Muhammad Kusasi, dihadiri para asisten, staf ahli, para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab HSS dan anggota DPRD.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378804/dprd-hss-paripurnakan-penyampaian-kua-ppas-tahun-2024>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-hss-paripurnakan-penyampaian-kua-ppas-tahun-2024-beritaja-56954.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.